

## Peran Sila Pertama Pancasila dalam Membangun Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia

Anya Aurelia Salsabila<sup>1</sup>, Asya Maulidha<sup>2</sup>, Devita Anjelina Putri<sup>3</sup>, Firna Khusnia Ramadhani<sup>4</sup>, Muhammad Ridho Ananda<sup>5</sup>

[1anya.aurelia.2404216@students.um.ac.id](mailto:1anya.aurelia.2404216@students.um.ac.id)

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang 10, Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia

### Abstract

The study in this article aims to find out how the first principle of Pancasila can contribute to building tolerance between religious communities in Indonesia through analyzing the case of the closing of the Bogor GKI Yasmin church in 2010. The research in this article uses qualitative methods by analyzing historical documents and reviewing official documents such as government decisions, media reports, and publications from human rights organizations to understand the legal and social context of the GKI Yasmin case. The results of the analysis show that despite long conflicts over land ownership and religious freedom, dialogue continues between government officials, church leaders, and Community members finally succeeded in realizing the relocation of the church. These results highlight the importance of following the principles of Pancasila, especially the emphasis on unity and diversity as fundamental values for national coherence. This study highlights the important role of institutional commitment and collective efforts in resolving religious disputes that exist in Indonesia, so that the environment is conducive to mutual support. respect between different faiths. This study also emphasizes the need for politicians to prioritize inclusive decision-making processes that address the concerns of all parties, so that no group feels marginalized or excluded from the national development process. Finally, this research shows that adherence to Pancasila can function as a tool in promoting social harmony and defend human rights, especially those related to religious freedom.

**Keywords:** *Pancasila; First precept; GKI Yasmin*

### Abstrak

Studi pada artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sila pertama Pancasila dapat berkontribusi dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia melalui analisis kasus penutupan gereja Bogor GKI Yasmin pada tahun 2010. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis dokumen historis dan mengkaji dokumen resmi seperti keputusan pemerintah, laporan media, dan publikasi dari organisasi hak asasi manusia untuk memahami konteks hukum dan sosial dari kasus GKI Yasmin. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun konflik panjang tentang kepemilikan tanah dan kebebasan beragama, dialog yang berlanjut antara pejabat pemerintah, pimpinan gereja, dan warga masyarakat akhirnya berhasil merealisasikan relokasi gereja. Hasil ini menyoroti pentingnya mengikuti prinsip-prinsip Pancasila, terutama penekanan pada kesatuan dan diversitas sebagai nilai-nilai fundamental untuk koherensi nasional. Studi ini menyoroti peran penting komitmen instansi dan upaya kolektif dalam menyelesaikan perselisihan agama yang ada di Indonesia, sehingga lingkungan yang kondusif untuk saling menghormati di antara iman yang berbeda. Studi ini juga menekankan perlunya para politisi prioritasi proses pengambilan keputusan inklusif yang menangani kekhawatiran semua pihak, sehingga tidak ada grup yang merasa marginal atau dieklusif dari proses pembangunan nasional. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa adhesi ke Pancasila dapat berfungsi sebagai alat dalam mempromosikan harmoni sosial dan mempertahankan hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan kebebasan beragama.

**Kata kunci:** *Pancasila; Sila pertama; GKI Yasmin*

## PENDAHULUAN

Peran Sila Pertama Pancasila dalam Membangun Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia, khususnya dalam konteks penutupan GKI pada tahun 2010, merupakan tema yang sangat relevan untuk dibahas. Penutupan GKI menandai sebuah titik kritis dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia, di mana insiden ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat yang majemuk. Data dari Setara Institute menunjukkan bahwa pada tahun 2010, terdapat peningkatan kasus intoleransi yang berujung pada penutupan tempat ibadah, termasuk GKI, yang menimbulkan protes dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai toleransi, implementasinya masih menghadapi kendala.

Wawasan mengenai toleransi antarumat beragama dapat diperoleh melalui pemahaman mendalam tentang sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa." Sila ini tidak hanya menegaskan keberadaan Tuhan yang Maha Esa tetapi juga mengakui keberagaman keyakinan agama. Dalam konteks ini, rencana pemecahan masalah melibatkan pendidikan multikultural dan dialog antaragama sebagai langkah strategis untuk membangun kesadaran dan penerimaan. Melalui pendekatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan sebuah kekayaan yang harus dijaga dan dirayakan.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana sila pertama Pancasila dapat dijadikan pedoman dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap upaya memperkuat toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Rangkuman kajian teoritik menunjukkan bahwa Pancasila memiliki potensi besar sebagai landasan moral dan etika dalam membangun toleransi. Penelitian oleh M. Quraish Shihab (2017) menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menciptakan lingkungan inklusif dan harmonis, di mana setiap individu dapat hidup berdampingan tanpa diskriminasi. Selain itu, Kementerian Agama RI menyatakan bahwa keragaman agama di Indonesia adalah keniscayaan yang harus dikelola dengan bijak melalui dialog antarumat beragama.

Permasalahan lain yang timbul akibat ketidakpahaman dan kurangnya komunikasi antarumat beragama dapat memicu konflik. Penutupan GKI menjadi contoh nyata bagaimana stereotipe dan prasangka dapat mengarah pada tindakan intoleran. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Program-program pendidikan berbasis Pancasila harus menjadi prioritas bagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini.

Pemerintah juga memiliki peran vital dalam menciptakan suasana kondusif bagi keberagaman agama. Kebijakan yang mendukung kebebasan beribadah dan perlindungan terhadap tempat ibadah harus ditegakkan secara konsisten. Selain itu, pemerintah perlu mendorong dialog lintas agama sebagai sarana untuk membangun pemahaman dan saling menghargai antarumat beragama.

Melalui artikel ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam konteks keberagaman agama di Indonesia serta bagaimana implementasinya dapat membantu mencegah konflik serupa di masa depan. Dengan mengedepankan dialog dan pendidikan berbasis nilai-nilai Pancasila, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi aktif masyarakat sipil juga diperlukan dalam menciptakan kerukunan antarumat beragama.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menganalisis kontribusi sila pertama Pancasila dalam membangun toleransi antarumat beragama di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus penutupan gereja GKI Yasmin di Bogor pada tahun 2010.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dokumen historis serta dokumen resmi yang relevan dengan kasus GKI Yasmin. Peneliti melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber, termasuk keputusan pemerintah, laporan media, dan publikasi dari organisasi hak asasi manusia. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai konteks hukum dan sosial yang mengelilingi kasus tersebut.

Sasaran penelitian ini mencakup masyarakat yang terlibat dalam kasus GKI Yasmin, termasuk anggota gereja, pejabat pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive, dengan memilih sumber atau dokumen resmi yang memiliki informasi relevan mengenai konflik penutupan gereja GKI Yasmin..

Pengambilan data dilakukan melalui beberapa metode, termasuk studi dokumen untuk menganalisis dokumen resmi dan laporan media yang berkaitan dengan isu-isu kunci dalam konflik. Selain itu, pengambilan data dilakukan dengan analisis media cetak dan elektronik, termasuk artikel berita dan jurnal terdahulu yang berkaitan dengan kasus GKI Yasmin untuk mengetahui konteks yang lebih luas tentang GKI Yasmin.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti dialog antar pihak, perlunya prinsip Pancasila, dan toleransi beragama. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat konflik berkepanjangan terkait kepemilikan tanah dan kebebasan beragama, dialog yang berkelanjutan antara pihak-pihak terkait berhasil menghasilkan solusi yang konstruktif. Temuan ini mencerminkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam konteks kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pancasila diciptakan dengan harapan akan mampu mengayomi dan melindungi seluruh warga negara yang berbeda suku, agama dan ras (Nini, 2020). Setiap sila yang tertuang dalam Pancasila memiliki misi yang berbeda akan tetapi merujuk pada satu visi yang sama yaitu, untuk menciptakan kehidupan bernegara dan berbangsa secara aman dan damai. Kelima dasar Pancasila merupakan penuntun yang sangat ideal dan sudah seharusnya dipatuhi serta dilaksanakan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang membutuhkan keharmonisan dan penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia. Seluruh butir yang terkandung dalam lima sila Pancasila sesungguhnya telah menjadi landasan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjaga keutuhan bangsa. Sebagai individu yang mejadi bagian dari rakyat Indonesia hanya perlu mengimplementasikan Pancasila di kehidupan. Implementasi nilai pancasila adalah sebuah proses, penerapan, ide, konsep, kebijakan yang menerapkan atau mengaplikasikan lima nilai Pancasila dalam kehidupan individu, sosial kemasyarakatan dan kebangsaan (Sapta, 2020). Sila yang paling utama merupakan “Ketuhanan yang Maha Esa” karena ketika manusia berhasil menjalankan sila pertama dimana terdapat hubungan antara individu dengan Tuhan-nya dan jika manusia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan-nya maka akan lebih mudah dalam membangun hubungan sesama manusia sehingga dapat menciptakan tujuan sila-sila selanjutnya. Ketuhanan yang Maha Esa memiliki peran dalam

membangun kesadaran dan penghormatan terhadap berbagai agama yang serta mendorong toleransi antar umat beragama di Indonesia. Semangat Ketuhanan Yang Maha Esa itu hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa Indonesia untuk bersatu padu di bawah tali Tuhan Yang Maha Esa (Nany, 2022).

Salah satu konflik agama terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah penutupan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor pada tahun 2010. Meski Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang jelas tentang kebebasan beragama, kenyataannya penerapan di lapangan masih menemui banyak kendala, seperti yang terlihat pada kasus ini. Konflik ini berjalan hampir 2 windu. Penutupan GKI Yasmin di Bogor merupakan cerminan adanya sikap intoleran terhadap agama yang berbeda. Penolakan pendirian gereja ini datang dari sekelompok orang yang menyatakan diri tergabung pada forum ulama se Kota Bogor. Mirisnya, surat pembekuan ini dikeluarkannya izin pembangunan oleh Walikota Bogor yakni Diani Budiarto pada 13 Juli 2006. Hal ini tentu bertentangan dengan hukum administrasi karena tidak lazim surat keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara dibekukan oleh pejabat dibawahnya secara struktural. Hal ini akhirnya mendorong pihak GKI Yasmin menggugat surat Kepala Dinas tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan, terjadi aksi unjuk rasa yang berujung pengusiran jama'at gereja yang pada saat sedang menjalankan ibadah (Imam, 2019). Selain terkena usir paksa, jemaat GKI tak diperbolehkan untuk menggunakan gereja. Karena tidak diizinkan menggunakan bangunan gereja, mereka terpaksa beribadah di trotoar atau ruang-ruang publik lainnya. Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun, menunjukkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas. Ironisnya, kasus ini bertentangan dengan prinsip dasar Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa." Sila ini menekankan pentingnya menghormati keberagaman agama dan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 juga secara tegas menjamin kebebasan beragama. Sayangnya, konflik seperti ini memperlihatkan kesenjangan antara nilai-nilai ideal yang tercantum dalam hukum dan kenyataan di masyarakat. Padahal, sila pertama Pancasila yang menegaskan prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" berfungsi sebagai landasan moral dan etis dalam memelihara kerukunan antarumat beragama. Setiap agama yang diakui di Indonesia pasti mengajarkan kebaikan seperti sifat kasih sayang dan toleransi. Aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan GKI Yasmin Bogor ini sudah jelas mencerminkan sikap intoleran dan sangat bertentangan dengan ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Toleransi adalah hidup secara damai dalam menjalankan kehidupan. Toleransi harus menjadi kesadaran kolektif yang kuat pada setiap individu karena menumbuhkan sikap saling memahami dan menghargai (Oloria, 2021). Tidak hanya terdapat dalam Pancasila akan tetapi kebebasan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing juga telah diatur sedemikian rupa yang dituangkan ke dalam UUD 1945 pasal 29. Negara telah memberikan pengakuan mengenai jaminan kebebasan beribadah dan beragama yang artinya setiap warga negara Indonesia wajib mampu hidup dalam keberagaman agama. Negara dengan keberagaman agama semestinya menjaga eksistensi sosial supaya dapat terhindar dari benturan ideologi maupun fisik. Perbedaan bukan sebuah hal yang harus disembunyikan karena hal tersebut bukanlah aib akan tetapi justru menjadi kebanggaan dan identitas bangsa. Toleransi dapat diwujudkan jika masyarakat memiliki hati tulus, ikhlas dan kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa Indonesia.

Multikulturalisme mengandaikan adanya praktik kewarganegaraan (citizenship) yang lebih demokratis, dimana pengakuan kesederajatan dan kesetaraan terhadap hak-hak individu dan identitas kolektif harus tersedia dalam ruang publik. Kelompok minoritas membutuhkan kebijakan-kebijakan publik yang mampu menjamin kesetaraan dengan perlakuan yang sama seperti yang diterima kelompok lain dalam suatu negara. Hal ini misalnya, dapat ditempuh dengan

mengandaikan adanya "hak-hak kelompok" bagi minoritas yang rentan sebagai korban eksklusi yang dipaksakan. Hak-hak kelompok perlu diberikan untuk menjaga identitas minoritas agar tidak terjebak dalam homogenisasi. Hal ini adalah kesediaan untuk mau menerima kelompok lain yang berbeda dalam suatu sistem sosial tanpa mempedulikan perbedaan yang ada di antara mereka. Dapat dilihat bagaimana susahnya jama'at GKI Yasmin memperjuangkan hak mereka sebagai rakyat Indonesia. Sejenak, bayangkan jika tidak ada penolakan pada saat itu sehingga pembangunan gereja berjalan secara lancar dan masyarakat dapat menjalankan ibadah masing-masing sesuai kepercayaan secara berdampingan. Tentunya tidak akan ada aksi unjuk rasa yang berujung pada pengusiran pada saat menjalankan ibadah dan kasus intoleran ini tidak akan berjalan hingga lebih dari 10 tahun. Meskipun, pada akhirnya semua pihak ikut memperjuangkan hak minoritas akan tetapi konflik ini meninggalkan bekas mendalam terhadap masyarakat dan menjadi salah satu fenomena intoleran yang berlangsung cukup panas.

Demi menghindari terjadinya konflik yang serupa, sebagai rakyat kita dapat melakukan berbagai upaya supaya tali toleransi di Indonesia terikat semakin erat. Langkah yang bisa diambil diantaranya penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah yang konsisten dan tanpa memihak, termasuk dalam mengimplementasikan putusan pengadilan terkait kebebasan beragama, kemudian penting untuk memperkuat pendidikan tentang keberagaman dan toleransi, baik melalui sekolah maupun kegiatan komunitas. Selanjutnya membangun peningkatan pengetahuan dengan menciptakan dialog antar umat dengan melibatkan beberapa tokoh agama dari masing-masing agama, masyarakat dan pemerintah tentang pentingnya menjaga keselarasan antarumat. Serta mengadakan evaluasi kebijakan peraturan yang mengatur pendirian rumah ibadah, seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006, perlu ditinjau ulang agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Perspektif Hukum dan Keberagaman, menunjukkan bahwa kasus ini merupakan bukti nyata tantangan dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Kasus ini menggarisbawahi lemahnya implementasi prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam konstitusi. Konflik GKI Yasmin mencerminkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menjalankan putusan hukum, tekanan dari kelompok intoleran, serta kurangnya upaya kolektif untuk menjaga harmoni dalam masyarakat yang beragam. (Silaen, Victor (2012). Victor juga menyoroti perlunya pemerintah memastikan keberlanjutan penegakan hukum tanpa tunduk pada tekanan kelompok tertentu, agar nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia untuk menguatkan fondasi keberagaman melalui kebijakan yang inklusif dan melindungi hak-hak semua warga negara tanpa diskriminasi.

Selain itu, masyarakat dapat menormalisasikan dialog antarumat. Percakapan agama ini bertujuan untuk mencapai saling pengertian atau menyelesaikan konflik dengan mendengarkan secara aktif, empati, dan keterbukaan pikiran. Dalam percakapan ini setiap umat juga bisa saling menyampaikan ajaran kebaikan agama masing-masing tanpa harus merasa agamanya paling benar dan sempurna. Menurut (Zainol Hasan, 2018) dialog antarumat agama ini adalah bertemunya hati yang iklas serta sadar dengan pikiran terbuka antar pemeluk berbagai agama, komunikasi yang dilakukan oleh para individu yang percaya kepada agama sebagai jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama menyangkut kepentingan bersama. Dialog antarumat yang benar dapat menciptakan perdamaian karena dapat menimbulkan pemahaman mengenai kerukunan di kehidupan sosial. Untuk kelancaran dialog ini terdapat beberapa syarat seperti saling terbuka, saling menghormati dan saling memberikan kesediaan untuk mendengarkan yang lain. Perlu ditekankan pada setiap individu bahwa dialog antarumat beragama ini adalah cara untuk menemukan titik temu perdamaian antar agama bukan sebagai pencari celah berbeda yang dapat menimbulkan perpecahan antar agama di Indonesia. Sebagai

rakyat yang menjadi bagian dari negara dengan beragam agama wajib menolak dengan tegas dan mencela segala bentuk tindak kekerasan atas nama agama, hal tersebut bukan hanya tercela di hadapan Tuhan akan tetapi juga tercela di mata manusia karena menimbulkan berbagai macam kerusuhan dan merusak tatanan keharmonisan yang ada di Indonesia (Silvester, 2022)

Hal lain yang dapat dilakukan yaitu memberikan pengetahuan pendidikan toleransi. Pendidikan toleransi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai seperti empati, penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, suku, pandangan, atau latar belakang, serta cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Melalui pendidikan toleransi, individu diajak untuk memahami bahwa perbedaan adalah sesuatu yang alami dan bukan alasan untuk membeda-bedakan atau mendiskriminasi orang lain. Dengan begitu, tercipta masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan inklusif. Pendidikan toleransi biasanya diajarkan melalui diskusi, pengalaman langsung, atau kegiatan yang melibatkan kerja sama antarindividu dari berbagai latar belakang. Kasus penutupan GKI Yasmin di Bogor dapat menjadi contoh bagaimana pendidikan toleransi bisa diterapkan untuk mencegah konflik dan membangun pemahaman antarumat beragama. GKI Yasmin, sebuah gereja yang telah memenuhi semua persyaratan hukum untuk pendirian rumah ibadah, menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat setempat yang berujung pada penyegelan gereja. Kasus ini mencerminkan kurangnya pemahaman akan pentingnya hak beragama dan toleransi dalam masyarakat yang majemuk. Pendidikan toleransi dapat diimplementasikan dalam situasi seperti ini melalui berbagai cara. Misalnya, mengadakan dialog lintas agama di tingkat komunitas yang melibatkan para pemimpin agama, masyarakat, dan pemerintah setempat untuk membangun saling pengertian. Dalam dialog ini, masyarakat dapat dididik tentang pentingnya menghormati hak beragama yang dijamin oleh konstitusi serta dampak positif dari keberagaman dalam kehidupan sosial. Selain itu, melalui pendidikan formal di sekolah, kasus seperti GKI Yasmin dapat diangkat sebagai studi kasus untuk mengajarkan siswa tentang nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan toleransi. Pendidikan toleransi yang berangkat dari kasus nyata seperti GKI Yasmin tidak hanya memberikan solusi untuk mengatasi konflik tetapi juga menjadi alat untuk mencegah insiden serupa di masa depan, dengan membangun masyarakat yang lebih memahami pentingnya hidup berdampingan secara damai. (Hasani, I & Naipospos B.T, 2011)

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan mengenai perlindungan hak beragama yang merupakan upaya untuk memastikan setiap individu memiliki kebebasan menjalankan keyakinan dan ibadahnya tanpa takut akan diskriminasi, intimidasi, atau kekerasan. Hak ini diakui secara universal dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 18), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, termasuk kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, serta kebebasan untuk mengekspresikan agama atau kepercayaannya secara pribadi maupun publik, baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29, yang menegaskan bahwa negara menghormati kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan masing-masing penduduk. Contoh nyata dari perlindungan ini dapat dilihat pada kebijakan negara dalam membangun rumah ibadah. Meski masih terdapat tantangan, idealnya pemerintah menjamin kemudahan bagi setiap komunitas agama untuk mendirikan rumah ibadah tanpa tekanan atau hambatan birokrasi yang berlebihan. Selain itu, program-program pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai toleransi beragama juga merupakan bentuk nyata dari perlindungan hak beragama, karena hal ini membantu mengurangi konflik antarumat beragama. Dalam kasus konkret, perlindungan ini dapat berupa tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap kelompok-kelompok yang melakukan perusakan atau melarang kegiatan keagamaan

kelompok tertentu, sehingga kebebasan beragama tetap terjaga. Sebagai catatan, banyak penelitian menunjukkan pentingnya perlindungan hak beragama dalam menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Misalnya, jurnal *International Journal on Minority and Group Rights* menyoroti bagaimana kebijakan perlindungan hak beragama mampu menurunkan tensi konflik antaragama di berbagai negara. Sementara itu, dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menunjukkan bahwa penguatan dialog antaragama menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan harmoni sosial. Perlindungan hak beragama bukan hanya tentang memberikan kebebasan, tetapi juga menciptakan ruang di mana perbedaan bisa hidup berdampingan secara sejajar, dengan dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah

## **KESIMPULAN**

Penutupan Gereja Kristen Yasmin Indonesia di Bogor merupakan contoh nyata tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yang mengajarkan pentingnya “iman kepada Tuhan Yang Maha Esa” tersebut. Menghargai keberagaman agama dan kebebasan beragama. Meski Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas, seperti Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama, namun kenyataan di lapangan seringkali menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal tersebut dengan implementasinya.

Penutupan GKI Yasmin mencerminkan sikap intoleransi terhadap kelompok agama minoritas dan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan keputusan hukum. Aksi protes yang berujung pada pencopotan anggota gereja, pelarangan penggunaan tempat ibadah, dan penyelenggaraan ibadah di trotoar, jelas merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi negara.

Peristiwa ini bertentangan dengan nilai inti Pancasila yang menekankan pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman. Pancasila dengan visi membangun kehidupan nasional yang damai dan harmonis memberikan landasan moral yang kuat dalam mengatasi konflik antar umat beragama. Sayangnya, lemahnya penerapan sila Pancasila mencerminkan ketidakmampuan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat majemuk.

Peristiwa GKI Yasmin menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia untuk mengembangkan kebijakan yang memperkuat inklusivitas, melindungi hak-hak minoritas, dan mendukung keberagaman. Bagaimanapun, keharmonisan sosial di Indonesia hanya dapat tercapai jika setiap individu menyadari pentingnya toleransi, saling menghormati dan kerja sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Indonesia, sebagai bangsa yang majemuk, harus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2011). Pancasila dan Toleransi Beragama di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hasan, Z. (2018). Dialog Antar umat beragama. LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan, 12(2), 387-400.
- Ismail, H & Bonar, T, N. 2012. Dari Radikalisme Menuju Terorisme. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Malau, O., Saragih, R., Marbun, R. C., Simanungkalit, R., & Siahaan, M. (2021). Kearifan Lokal Masyarakat Tapanuli Utara sebagai Wahana dalam Membangun Toleransi Umat Beragama. Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen, 2(1), 1-10.
- Nusa, S., & Theedens, Y. M. (2022). Membangun Sikap Moderasi Beragama yang Berorientasi pada Anti Kekerasan Melalui Dialog. Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(3), 4208-4220.
- Purba, I. P., & Yudi, P. (2019). Implementasi Jaminan Konstitusi terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan), 4(2), 40-52.
- Riswadi, M.Pd. (29 Agustus 2023). Berpancasila dan Beragama dengan Benar. Diakses dari <https://kemenag.go.id/kolom/berpancasila-dan-beragama-dengan-benar-tES9o>
- Rohmah, U. (25 Desember 2023). Toleransi dalam Beragama sebagai Bentuk Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Diakses dari <https://formadiksi.um.ac.id/toleransi-dalam-beragama-sebagai-bentuk-aktualisasi-nilai-nilai-pancasila/>
- Sari, D. R. (2015). Analisis Konflik Agama: Kasus GKI Yasmin di Bogor. Jurnal Studi Agama, 10(2), 123-145.
- Silaen, Victor. 2012. *Bertahan Di Bumi Pancasila*. Jakarta: Yayasan komunikasi Bina Kasih.
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah berdasarkan hak konstitusional warga negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(3), 433-446.
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Implementasi nilai Pancasila dalam menangani intoleransi di Indonesia. Jurnal Lemhannas RI, 8(3), 172-189.